



DJKN

LAPORAN TAHUNAN

PPID TINGKAT II

KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT

2024





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN BARAT

JALAN LETNAN JENDERAL SUTOYO NO. 122 PONTIANAK SELATAN 78121; TELEPON: (0561) 584150; FAKSIMILE:
(0561) 584151

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT II
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2024

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, Kanwil DJKN Kalimantan Barat sebagai PPID Tingkat II memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id/ maupun melalui portal website Kanwil DJKN Kalimantan Barat dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar.

Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID

Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh Kanwil DJKN Kalimantan Barat secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi Kanwil DJKN Kalimantan Barat dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

✚ Alamat Kantor	: Jl. Letnan Jendral Sutoyo No.122 Pontianak
✚ Telpon	: (0561) 584150
✚ SMS/whatsapp	: 089523226595
✚ E-mail PPID	: ppid.djknkalbar@kemenkeu.go.id
✚ E-mail Pengaduan	: pengaduandjkn.kalbar@kemenkeu.go.id
✚ Facebook	: Kanwil DJKN Kalimantan Barat
✚ Instagram	: kanwildjknkalbar
✚ Twitter	: @djknkalbar
✚ Youtube	: Kanwil DJKN Kalimantan Barat

Di samping itu, Kanwil DJKN Kalimantan Barat telah menyediakan fasilitas area pelayanan terpadu (APT) yang berada di lantai 1 (satu) Gedung Kanwil DJKN Kalimantan Barat yang berlokasi di Jl. Letnan Jenderal Sutoyo No. 122 Kota Pontianak. Area Pelayanan Terpadu ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang pelayanan bagi *stakeholders* diantaranya Buku Tamu Elektronik, Bahan Bacaan, *e-Banner*, TV, AC, dan berbagai fasilitas lainnya. Berdampingan dengan ruang APT, terdapat Ruang *Coworking Space*, Ruang Konsultasi, dan Pojok SMV yang dapat digunakan bagi para *stakeholders* yang bertamu ke Kanwil DJKN Kalimantan Barat.



SARANA DAN PRASARANA

Ruang Area Pelayanan Terpadu



Pojok Konsultasi
dan Pojok SMV



Co Working
Space



Co Working
Space



3. Sumber Daya Manusia

Guna mendukung layanan informasi melalui PPID, Kanwil DJKN Kalimantan Barat dengan salah satu tugas utama melakukan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan merupakan *Unit in Charge* PPID Tingkat II. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Kalimantan Barat yang terdiri dari 3 (tiga) orang pegawai, yaitu Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, Kepala Seksi Informasi, dan seorang pelaksana pada Seksi Informasi ditunjuk menjadi *Person in Charge* PPID Tingkat II pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat.

4. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2024, Kanwil DJKN Kalimantan Barat **tidak menerima** permintaan informasi publik. Selain itu, berdasarkan hasil monitoring serta laporan PPID Tingkat III yang disampaikan kepada kami, pada KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang juga **tidak terdapat** catatan permintaan informasi publik (**NIHIL**). Adapun rincian pelayanan permintaan informasi publik tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Pelayanan Informasi Publik

1	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Nihil
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	Nihil
3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	Nihil
4	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	Nihil
5	Kedudukan hukum Pemohon	Nihil
6	Jalur Permintaan Informasi Publik	Nihil

Rincian Penyelesaian Keberatan

1	Jumlah keberatan yang diterima	Nihil
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	Nihil

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1	Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi	Nihil
2	Hasil mediasi dan/ atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya;	Nihil
3	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara	Nihil
4	Hasil putusan pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaannya;	Nihil

5. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelayanan Layanan Informasi Publik

Tidak ada kendala dalam pelayanan layanan informasi publik pada eksternal maupun internal pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat.

6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholder* di lingkup Kanwil DJKN Kalimantan Barat, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan di lingkup Kanwil DJKN Kalimantan Barat yang meliputi:

- Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan strategi komunikasi yang baik dan komunikatif yang disusun oleh Kantor Pusat DJKN;
- Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis informasi di media cetak dan digital;
- Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada seperti layanan online pada kantor vertikal, media sosial maupun sosialisasi rutin;
- Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi di lingkup Kanwil DJKN Kalimantan Barat melalui sarana pemberitaan, media sosial, artikel, dan lain-lain.

RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT II
KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2024

No	Nama Kantor	No. Register	Tgl Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	No. Pemberitahuan Tertulis	Tgl Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika permintaan informasi ditolak)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	No. dan Tgl Und.Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	No. dan Tgl Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	No. dan tgl Und. Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	No. dan Tgl Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Ket
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
1	Kanwil DJKN Kalimantan Barat	NIHIL																							
2	KPKNL Pontianak	NIHIL																							
3	KPKNL Singkawang	NIHIL																							

Pontianak, 8 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat



Ditandatangani secara elektronik
Tetik Fajar Ruwandari

